

LAPORAN KINERJA

TAHUN
2024



DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dapat menyelesaikan Laporan Kinerja tahun Anggaran 2024, sebagai pertanggungjawaban Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Laporan ini merupakan laporan kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan dan sebagai tolak ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai instansi teknis dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam Laporan ini juga diuraikan tentang akuntabilitas kinerja yang mencakup keberhasilan dan hambatan yang dialami. Hal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi masukan-masukan yang berguna bagi pengembangan program dan kegiatan serta efektivitas dan efisiensi pada masa yang akan datang.

Disadari bahwa diperlukan komitmen, kerja keras, dan kerjasama dari seluruh jajaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis guna mewujudkan visi misi yang telah ditetapkan. Selanjutnya diharapkan kegiatan-kegiatan akan semakin terukur dan lebih tajam pencapaian outcomenya sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan kami berharap agar Laporan Kinerja ini dimanfaatkan sebagai media evaluasi.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan, meskipun demikian kami telah berusaha menyajikan laporan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kepada para pihak yang telah membantu sampai selesainya penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

Palembang,

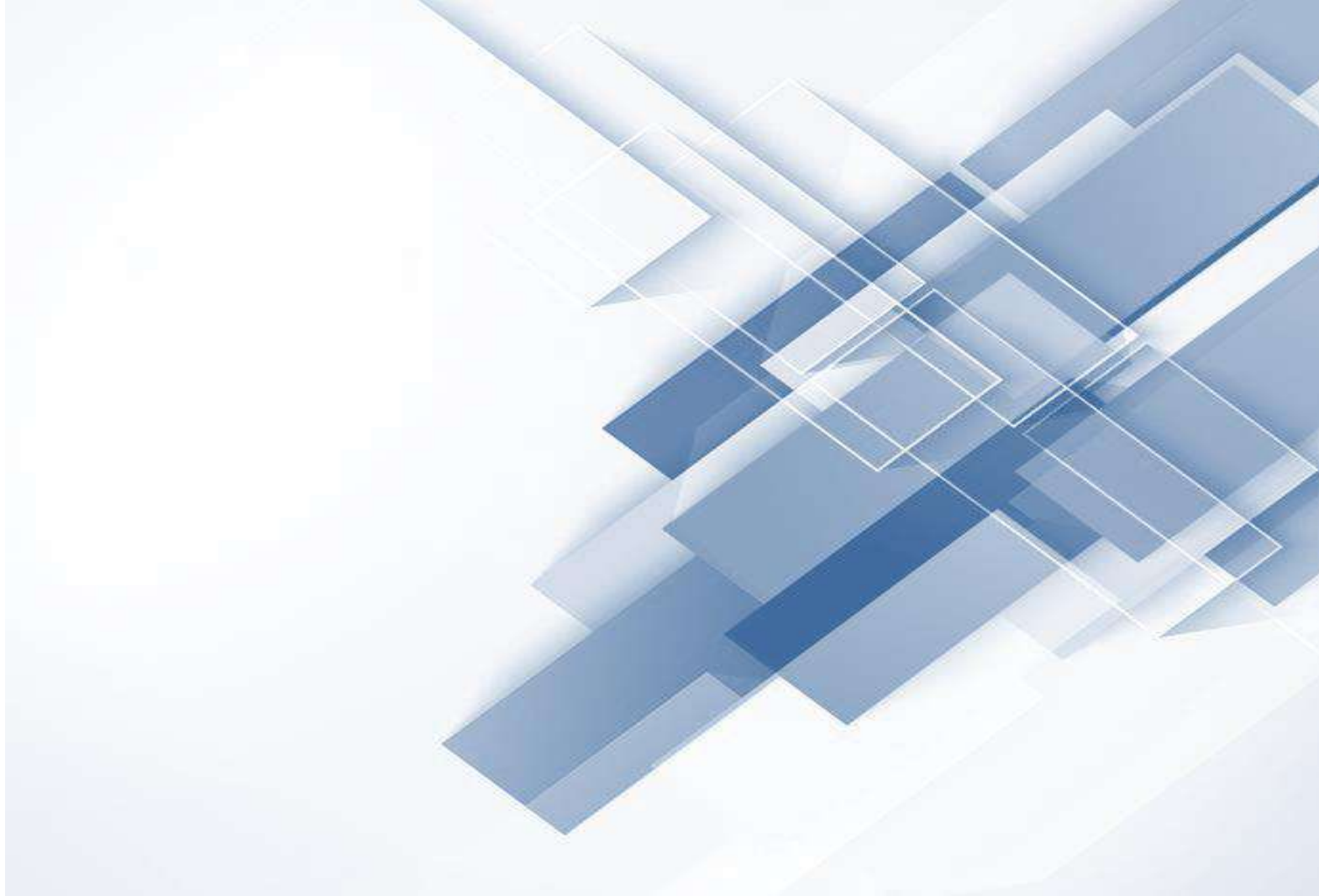
2025

**Pt. KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

**Drs. EDWARD CANDRA., M.H
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 197209061992011002**

Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
Gambaran Umum Organisasi	1
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
Penetapan Kinerja.....	15
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional	
5. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.	
7. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan capaian pernyataan kinerja	
B. Realisasi Anggaran tahun 2023.....	30
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	32





BAB I

PENDAHULUAN

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan melalui program ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berusaha mewujudkan Sumatera Selatan lebih Maju dengan Visi yang dicanangkan yaitu :

“ SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA ”

A

LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dilihat dalam perspektif yang luas mempunyai fungsi sebagai tempat untuk menyajikan kinerja pemerintah kepada masyarakat atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja dinas serta capaian kinerja selama Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini berdasarkan pada peraturan perundangan antara lain :

- 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;*
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan tindak pidana korupsi;*
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;*
- 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;*
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;*
- 6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026.*

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dibentuk dalam rangka membantu Gubernur sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka telah ditetapkan Visi yang ingin dicapai yaitu Menjadikan Tenaga Kerja dan Transmigran yang Produktif dan Berkualitas. Visi tersebut telah dijabarkan ke dalam beberapa misi, tujuan, dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas.

Untuk menilai capaian kinerja dari Program yang telah tertuang didalam Renstra dan Renja, maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi dan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2024 dan alat bantu dalam upaya perbaikan kinerja Dinas secara berkesinambungan di masa yang akan datang.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka telah dibentuk Perangkat Daerah baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Penjabaran lebih lanjut adalah dengan terbitnya Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.

Sesuai Peraturan Gubernur dimaksud, tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, sedangkan Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di provinsi;
- b. pembinaan teknis di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di kabupaten/kota;
- c. pengkoordinasian program dan kegiatan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian secara lintas sektor/instansi, dan kabupaten/kota;
- d. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
- e. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas kabupaten/kota;
- f. pelaksanaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- g. penempatan dan perluasan tenaga kerja;
- h. pelaksanaan hubungan industrial, syarat kerja, dan jaminan sosial;
- i. pelaksanaan pengawasan terhadap norma kerja, norma kesehatan dan keselamatan kerja;
- j. pelaksanaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigrasi;
- k. pelaksanaan pembinaan pengembangan usaha ekonomi dan sosial budaya;
- l. pelaksanaan penelitian di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- m. pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

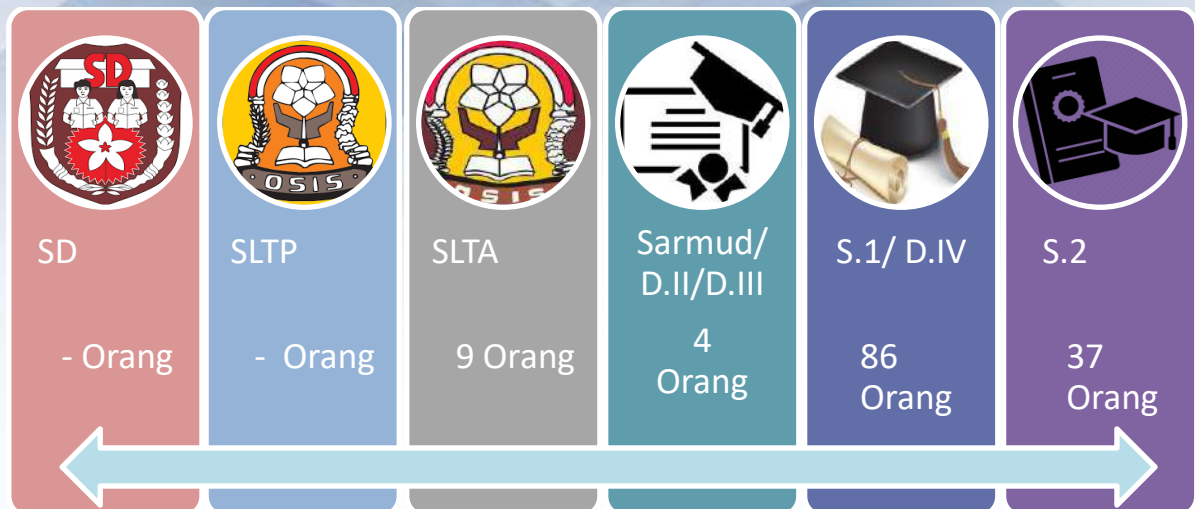
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan 2 urusan yaitu Urusan wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Ketenagakerjaan dan Urusan

Pilihan Bidang Ketransmigrasian. Kepala Dinas dibantu oleh 9 Unit Eselon III dan 27 Unit eselon IV dengan rincian sebagai berikut :



Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan pada tahun 2024, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan didukung personil sebanyak 136 orang yang dikelompokkan berdasarkan klasifikasi dibawah ini :

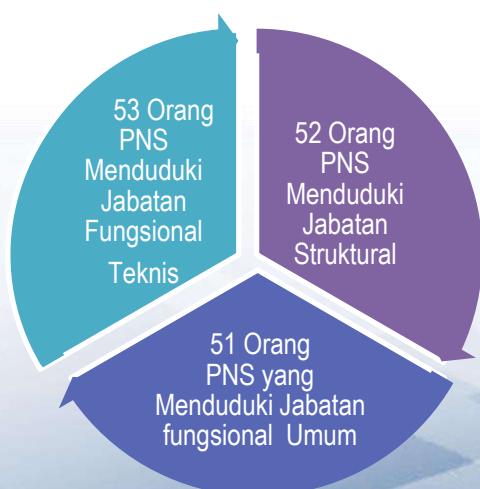
1. Menurut Tingkat Pendidikan : 148 org



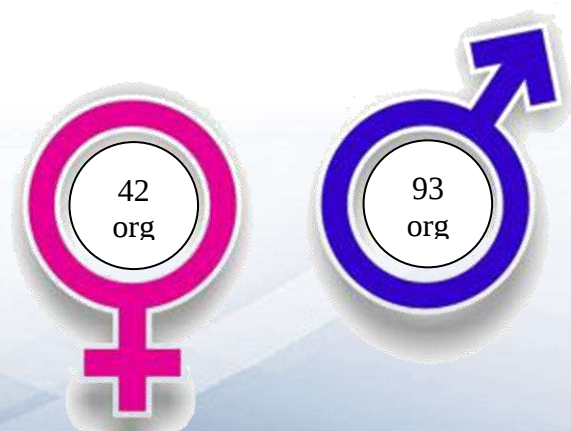
2. Menurut Golongan.



3. Menurut Jabatan / Non Jabatan



4. Menurut Jenis kelamin





Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 2 (dua) UPTD. Sebagai gambaran berikut kami uraikan fungsi masing-masing UPTD tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera selatan Nomor : 13 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Pembentukan, uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan :



1. Balai Latihan Kerja Pengembangan Produktivitas Keterampilan Transmigrasi, mempunyai fungsi :

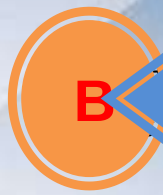
- a. Penyusunan program kerja pelatihan tenaga kerja, pelatihan keterampilan transmigrasi pengembangan produktivitas dan pemasaran program dan hasil latihan;
- b. Pelaksanaan koordinasi pelatihan keterampilan tenaga kerja, transmigrasi, dan pelatihan produktivitas serta sertifikasi;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait, perusahaan, lembaga pelatihan swasta dan usaha kecil menengah;
- d. Penempatan lulusan peserta pelatihan berkoordinasi dengan instansi terkait, BUMN/swasta, bursa kerja pada Dinas Tenaga Kerja, bursa kerja swasta, dan jejaring pelatihan lainnya;
- e. Pelaksanaan monitoring lulusan/alumni pelatihan melalui jejaring pelatihan ketenagakerjaan yang ada;

- f. Pembinaan pegawai UPTD, pegawai fungsional / instruktur dan penggerak swadaya masyarakat;
- g. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD;
- h. Pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala
- i. Seksi dan pelaksanaan serta fungsional;
- j. Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;



2. Balai Higiene Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Kegiatan Penyelidikan dan pengujian di Bidang Higiene Perusahaan, Kesehatan Kerja, Peyerasian antara Pekerja dan Lingkungan Kerja serta Peralatan (Ergonomi) dan Gizi Kerja dan Keselamatan Kerja;
- b. Pelaksanaan Pelatihan, Pemberian Petunjuk serta Bantuan Teknik Higiene Perusahaan, Kesehatan Kerja, Ergonomi dan Kesehatan Kerja kepada yang bersangkutan;
- c. Penyiapan Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan Pengujian dan Pelatihan Higiene Perusahaan, Kesehatan Kerja, Ergonomi dan Keselamatan Kerja serta penyusunan Program
- d. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Balai;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



ISU STRATEGIS

1. Angka pengangguran yang masih Perlu diperhatikan

Keadaan Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Selatan periode Agustus 2022- Agustus 2023 menunjukkan kondisi yang membaik dan mencapai target RPJMD Provinsi Sumatera Selatan yang sebesar 4,14. Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) menurun dari 4.11% pada tahun 2023 menjadi 3,86% pada tahun 2024. Persentase Penduduk Bekerja Tidak Penuh (<35 jam per minggu) masih cukup tinggi yaitu sebesar 37.69 %, dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup menyebabkan para pencari kerja terpaksa menerima atau melakukan pekerjaan apa saja meskipun tidak sesuai dengan pendidikan atau skill yang dimiliki.

2. Rendahnya Daya Saing Tenaga Kerja

Tingginya Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera Selatan belum seluruhnya memberikan dampak positif bagi perkembangan ketenagakerjaan. Rendahnya mutu Sumber Daya Manusia mengakibatkan tenaga kerja yang ada tidak memiliki daya saing. Penduduk Bekerja dengan Tingkat pendidikan rendah atau SD kebawah sebesar 1.17% dan tidak dimilikinya kompetensi menjadi penyebabnya. Untuk peningkatan daya saing, kehadiran BLK diharapkan dapat membantu para pencari kerja mendapatkan pelatihan dan kompetensi, namun peningkatan daya saing ini terkendala dengan kondisi BLK pada saat ini seperti belum disusunnya semua standar kompetensi, belum semua instruktur memiliki sertifikasi kompetensi, sarana dan prasarana belum seluruhnya sesuai dengan kebutuhan industri dan sertifikasi kompetensi belum dipakai sebagai dasar penggajian. Tingkat produktivitas sektor pertanian sebagai penyerap tenaga kerja yang cukup banyak masih rendah dibandingkan sektor lainnya.

3. *Ketidakseimbangan pasar Kerja.*

Ketidakseimbangan pasar kerja disebabkan belum berkualitasnya pasar kerja dan penempatan tenaga kerja. Pasar kerja yang kurang berkualitas ditandai dengan pendidikan angkatan kerja yang masih relatif rendah, penganggur berpendidikan rendah dan menengah serta banyaknya setengah penganggur. Dalam konteks pasar kerja global bahwa TKI memberikan kontribusi sumbangan devisa yang cukup besar namun masih banyak permasalahan yang dihadapi.

4. *Rendahnya kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja*

Masih rendahnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan disebabkan sistem Jaminan Sosial Nasional belum merata untuk seluruh pekerja baik formal maupun informal. Pada umumnya pekerja yang sudah dilindungi jaminan sosial ketenagakerjaan adalah pekerja sektor formal. Pekerja sektor formal Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 berjumlah **1.69 juta (37,66%)** sedangkan sektor informal berjumlah **2.79 juta (62,34%)**. Sebab lain adalah pelayanan dan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun belum mencakup untuk kelompok penduduk tertentu yang berkebutuhan khusus. Kesiambungan finansial BPJS Ketenagakerjaan juga masih diragukan terutama pada jaminan pensiun berkaitan dengan angka harapan hidup yang semakin baik, sehingga dimungkinkan kondisi keuangan BPJS tidak mencukupi untuk pembayaran seluruh manfaat pensiun.

5. *Masih terjadinya Perselisihan Hubungan Industrial*

Perselisihan hubungan industrial terjadi karena kurang harmonisnya kondisi hubungan industrial perusahaan, belum tercapainya kondisi hubungan kerja yang harmonis di tempat kerja dan belum optimalnya peran dan fungsi serta jumlah sarana hubungan industrial seperti Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, Lembaga Bipartit, Tripartit, peran Serikat Pekerja dan Asosiasi Pengusaha. Pengupahan juga masih sering menjadi permasalahan yaitu perbedaan persepsi pengupahan antara pekerja dan pengusaha. Perusahaan cenderung memberlakukan upah minimum sebagai standar upah di

perusahaan, sedangkan pekerja menjadikan upah untuk meningkatkan kesejahteraan. Permasalahan Sistem Outsourcing yang mempengaruhi hak-hak pekerja seperti perbedaan pandangan dalam penetapan pekerjaan pokok dan penunjang juga masih menjadi isu yang patut mendapatkan perhatian. Hubungan antara pekerja atau serikat pekerja dengan perusahaan hanya didasarkan hak dan kewajiban sehingga prinsip musyawarah dan mufakat sulit tumbuh di perusahaan.

6. *Belum optimalnya pelayanan pengawasan ketenagakerjaan*

Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan yang meliputi penerapan norma Kerja dan Norma K3 serta pembinaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan yang belum optimal disebabkan oleh terbatasnya jumlah Pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan. Minimnya kualitas dan kuantitas Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan juga ikut mempengaruhi pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan kepada masyarakat.

Di bidang Keteransmigrasian beberapa hal yang masih menjadi isu strategis adalah sebagai berikut :

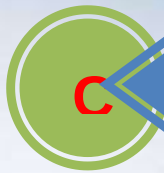
a. *Banyaknya permasalahan lahan yang perlu penanganan secara teknis.*

Permasalahan lahan disebabkan oleh keterbatasan lahan yang clear dan clean karena masih ada sisa beban tugas penyelesaian sertifikat kepemilikan lahan dan belum adanya regulasi Peraturan Presiden/Instruksi Presiden sebagai payung hukum dalam penyelesaian sertifikat kepemilikan lahan transmigrasi.

b. *Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan.*

Sinergi program dan dukungan anggaran untuk pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi tidak maksimal disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan data dan informasi, serta hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. Permasalahan ini disebabkan belum terjalinnya kerjasama antar daerah, lintas sektor, pemerintah dan non

pemerintah dan rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kawasan transmigrasi.



SISTEM PELAPORAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I - PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat tentang gambaran umum Organisasi, dengan penekanan kepada aspek startegis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi

BAB II - PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan tentang ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2024.

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan tentang :

- A. Capaian kinerja organsiasi, pernyataan kinerja sasaran organisasi dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara :
 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024
 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
 3. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra.
 4. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

B. Realisasi Anggaran

Menjelaskan tentang realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja

BAB IV - PENUTUP

Menjelaskan tentang Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi (Renstra) yang mencakup periode tahunan. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategi. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan yang dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja. Informasi yang termuat dalam rencana kinerja antara lain : sasaran yang ingin dicapai pada periode yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan targetnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan targetnya, serta keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi.

Didalam perencanaan kinerja telah tertuang perjanjian kinerja yang merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dengan Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2024 telah ditandatangani oleh masing-masing pihak yang berisikan Sasaran, Indikator Kinerja dan Target yang akan dicapai dalam 1(satu) tahun yaitu sebagai berikut :

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja	1. Tingkat Kesempatan Kerja	95,86
2.	Meningkatnya Kesejahteraan Tenaga Kerja	1. Persentase Perusahaan Patuh Hukum Ketenagakerjaan	50
3.	Pemantapan Transmigran	1. Persentase Tingkat Kebutuhan Transmigran	100



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jln. Jend. A. Yani No. 284, 14 Ulu Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon 510559 Faksimile. 511539 Kode Pos 30264
E-Mail : nakertranssumsel@ymail.com Website : www.disnakertrans.sumselprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. EDWARD CANDRA, M.H
Jabatan : Pjt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : ELEN SETIADI, S.H., M.S.E
Jabatan : Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang,

2025

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

ELEN SETIADI, S.H., M.S.E

PIHAK PERTAMA,
Pjt. KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Drs. H. EDWARD CANDRA, M.H
Pembina Utama
NIP. 197209061992011002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja	1. Tingkat Kesempatan Kerja	96,05
2.	Meningkatnya Kesejahteraan Tenaga Kerja	1. Persentase Perusahaan Patuh Hukum Ketenagakerjaan	55
3.	Pemantapan Transmigran	1. Persentase Tingkat Kebetahan Transmigran	100

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp30.877.593.000	APBD
2	Perencanaan Tenaga Kerja	Rp100.000.000	APBD
3	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp340.000.000	APBD
	Penempatan Tenaga Kerja	Rp705.000.000	APBD
5	Hubungan Industrial	Rp243.000.000	APBD
6	Pengawasan Ketenagakerjaan	Rp525.000.000	APBD
7	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Rp200.000.000	APBD
8	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp210.000.000	APBD
9	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp1.115.937.000	APBN
10	Pembinaan Ketenagakerjaan	Rp1.625.245.000	APBN
11	Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Rp190.780.000	APBN
12	Transmigrasi	Rp40.780.000	APBN
13	Dukungan Manajemen	Rp79.852.000	APBN

Palembang, 2025

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



ELEN SETIADI, S.H., M.S.E

PIL. KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SUMATERA SELATAN,


Drs. H. EDWARD CANDRA, M.H
Pembina Utama
NIP. 197209061992011002

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Tugas : Melaksanakan Kewenangan Desentralisasi dan Dekonsentrasi serta Tugas Pembantuan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian

- Fungsi :
- a. Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian
 - b. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum Lintas kabupaten/Kota
 - c. Pembinaan Teknis di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian Kabupaten/Kota
 - d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - e. Pelaksanaan Urusan Kesekretariatan Dinas
 - f. Penetapan Jaminan Kesejahteraan Purna Kerja dan Tenaga Asing
 - g. Penetapan dan Pengawasan atas Pelaksanaan Upah Minimum
 - h. Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Ketrasmigrasian
 - i. Penelitian Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian
 - j. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dengan Tugas dan Fungsinya

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus Perhitungan	Sumber data
1.	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	Terserapnya tenaga Kerja dipasar kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	BRS
2.	Meningkatnya Kesejahteraan Tenaga Kerja		Meningkatnya Iklim Ketenagakerjaan yang Kondusif dalam Hubungan Kerja	Persentase Perusahaan Patuh Hukum Ketenagakerjaan	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Kepatuhan Hukum}}{\text{Jumlah Perusahaan}} \times 100\%$	Bidang Pengawasan
3.	Pemantapan Transmigran	Persentase Tingkat Kebetahan Transmigran	Meningkatnya Kesejahteraan Transmigran	Persentase Tingkat Kebetahan Transmigran	$\frac{\text{Jumlah KK Awal Penempatan}}{\text{Jumlah KK Akhir Tahun}} \times 100\%$	Bidang PPUESB

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Agar dapat menggambarkan akuntabilitas kinerja, maka perlu diketahui capaian kinerja organisasi dengan cara membandingkan antara target dan realisasi serta membandingkan antara realisasi tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Berikut ini diuraikan capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan indikator-indikator yang telah disusun dalam penetapan kinerja.

A CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 diukur dengan maksud untuk mengetahui keberhasilan Dinas dalam melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Indikator yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.

Capaian indikator kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 merupakan tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dicapai pada Tahun 2024 diukur dengan membandingkan nilai indikator kinerja sasaran antara realisasi dengan target, yang ditampilkan dalam bentuk persentase (%).

Tabel 3.1
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tingkat Capaian Tahun 2024			
			Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	
1.	Teserapnya Tenaga Kerja dipasar Kerja	Tingkat kesempatan Kerja	%	95,86	96,14	100,29
2.	Meningkatnya Iklim Ketenagakerjaan yang Kondusif dalam Hubungan Kerja	Persentase Perusahaan Patuh Hukum Ketenagakerjaan	%	50	70,26	140,52
3.	Meningktanya Kesejahteraan Transmigran	Persentase Tingkat Kebetahan Transmigran	%	100	100	100

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun serta Capaian Kinerja Tahun ini, Tahun Lalu dan Beberapa Tahun

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Teserapnya Tenaga Kerja dipasar Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	%	94,49	95,02	95,37	95,89	96,14
2.	Meningkatnya Iklim Ketenagakerjaan yang Kondusif dalam Hubungan Kerja	Persentase Perusahaan Patuh Hukum Ketenagakerjaan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.	Meningktanya Kesejahteraan Transmigran	Persentase Tingkat Kebetahan Transmigran	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Dari Tabel 3.2. diatas, capaian kinerja masing-masing sasaran pembangunan Ketenagakerjaan dan Ket transmigrasian dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Tingkat Kesempatan Kerja*

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) adalah Persentase Jumlah Penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Jika Tingkat Kesempatan Kerja naik maka Tingkat Pengangguran Terbuka turun.

TPT mempunyai kegunaan untuk mengidentifikasi besarnya persentase angkatan kerja yang bekerja. Variabel untuk menyusun indikator ini diperoleh dari Sakernas dan Sensus Penduduk yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan indikator Tingkat Kesempatan Kerja dapat diinterpretasikan bahwa TKK yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang terserap pada pasar kerja.

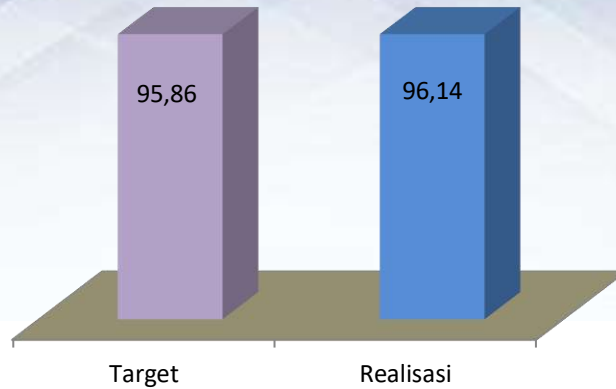
Tingkat Kesempatan Kerja pada Agustus 2024 sebesar 96,14. Angka ini lebih baik dari tahun 2023 yang sebesar 95,89% terjadi peningkatan sebesar 0,25% dibanding tahun 2022 yang sebesar 95,37% terjadi peningkatan dibanding tahun 2021 sebesar 94,49% tahun 2020.

Target Tingkat Kesempatan Kerja pada Tahun 2024 sebesar 95,86, berdasarkan Data BPS Kondisi Agustus 2024 yang dirilis November 2024 realisasi TKK sebesar 96,14 atau 100,29 persen.

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

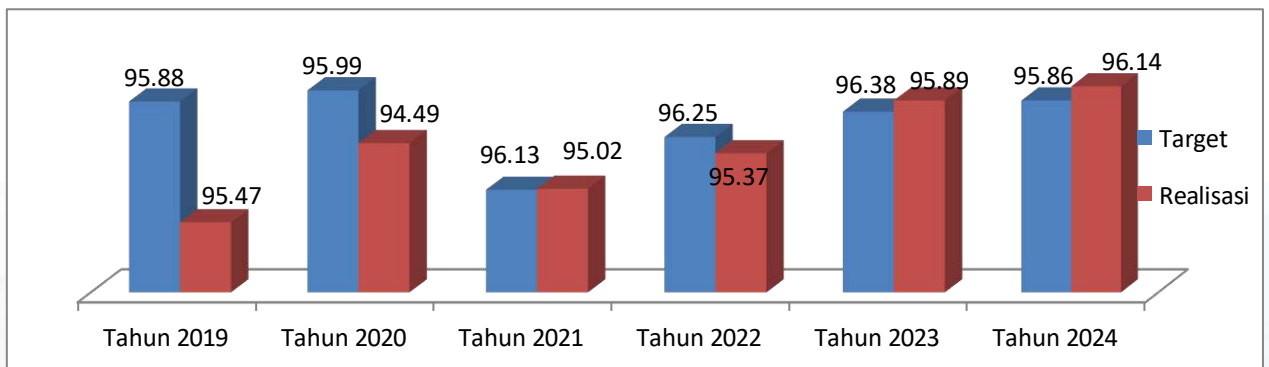
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Capaian Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	%
Teserapnya Tenaga Kerja dipasar Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	persen	95,86	96,14	100,29

Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2024 Tingkat Kesempatan Kerja



Indikator Kinerja		Satuan	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tingkat Kesempatan Kerja		%	95,88	95,47	95,99	94,49	96,13	95,02	96,25	95,37	96,38	95,89	95,86	96,14

Perbandingan Persentase Realisasi dan Target sampai tahun 2024 Tingkat Kesempatan Kerja



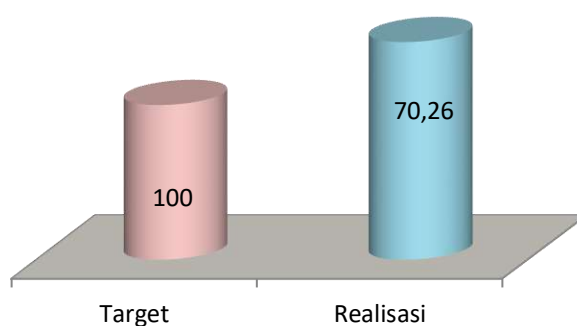
Tingkat Kesempatan Kerja ditargetkan meningkat terus sampai dengan tahun 2024.

2. *Perentase Perusahaan Patuh Hukum Ketenagakerjaan*

Indikator Kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Capaian Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Iklim Ketenagakerjaan yang Kondusif dalam Hubungan Kerja	Persentase Perusahaan Patuh Hukum Ketenagakerjaan	Persen	50	70,26	140,52

Perbandingan Realisasi Target tahun 2024 Persentase Perusahaan Patuh Hukum Ketenagakerjaan



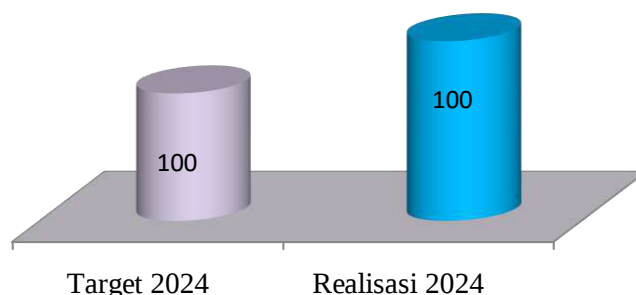
Perbandingan target dan Realisasi sampai dengan tahun 2024 juga belum dapat ditampilkan dari tahun 2019, karena indikator ini baru digunakan mulai tahun 2024 sebagaimana di Renstra Disnakertrans Tahun 2024-2026.

3. Persentase Tingkat Kebetahan Transmigran

Untuk tahun 2024 target Persentase Tingkat Kebetahan Transmigran sebesar 100 persen.

Perbandingan target dan realisasi tahun 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Target dan Realisasi Tahun 2024
Indikator Persentase Tingkat Kebetahan Transmigran

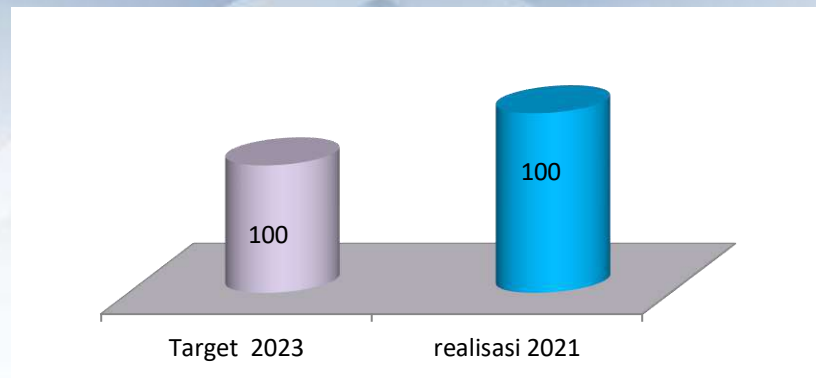


Untuk Perbandingan target sampai dengan tahun 2024 dengan realisasi tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 data belum bisa disajikan karena indikator baru digunakan mulai tahun 2024 di Renstra Disnakertrans Tahun 2024-2026.

Persentase Tingkat Kebetahan Transmigran menunjukkan apakah masih tetap ada di lokasi atau berkurang jumlahnya dikarenakan tidak betah. Persentase Tingkat Kebetahan Transmigran diharapkan selalu 100 persen yang menunjukkan bahwa warga transmigran tersebut betah di wilayah tersebut.

Perbandingan Realisasi target sampai dengan tahun 2024 belum dapat ditampilkan dari tahun 2019, namun bisa disajikan untuk tahun 2023-2024 karena indikator ini baru digunakan mulai tahun 2024 sebagaimana di Renstra Disnakertrans Tahun 2024-2026.

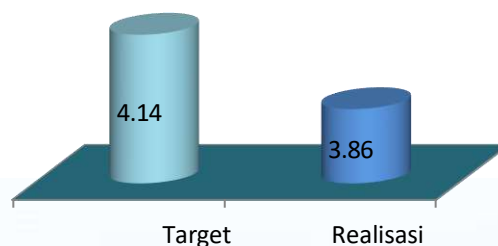
Perbandingan Realisasi target sampai dengan 2024 Persentase Tingkat Kebetahan



3.3 Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target RPJMD/RPD yang terdapat Pada Renstra Disnakertrans

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Capaian Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	%
Meningktanya Kesejahteraan Transmigran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,14	3,86	106,763

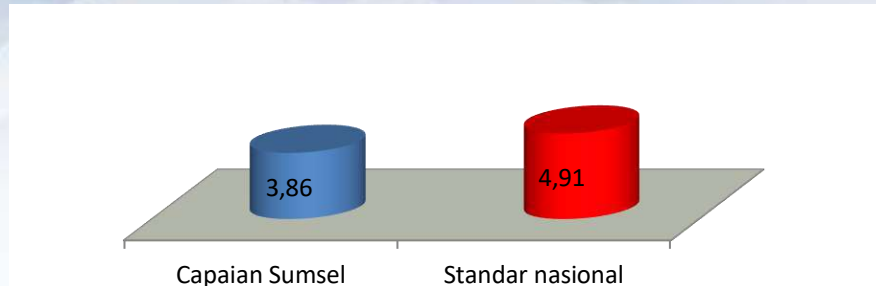
Proyeksi dan Realisasi tahun 2024 Indikator Kinerja Tingkat pengangguran Terbuka



Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar 4,14 persen dengan realisasi sebesar 3,86 persen atau capaian sebesar 106,763%. hal ini menunjukkan capaian yang baik melampaui persentase yang telah ditargetkan.

3.4. Realisasi Kinerja tahun ini dengan Standar Nasional

Perbandingan capaian indikator tahun 2024 terhadap standar Nasional dapat dilihat pada grafik ini:



Capaian Kinerja untuk indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan, apabila dibandingkan dengan capaian Nasional masih berada diatas capaian nasional, capaian sumsel pada tahun 2024 sebesar 3,86 persen, lebih baik dari Nasional yang sebesar 4,91 persen.

Untuk Tingkat Kesempatan Kerja Capaian Sumsel sebesar 96,14 persen atau lebihbaik dari Nasional yang sebesar 95,09 persen.

3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan menurunkan pengangguran dan meningkatkan kesempatan kerja di Sumatera Selatan ini merupakan akumulasi beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pasca Covid 19 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus melakukan upaya untuk memulihkan kondisi ketenagakerjaan di Sumatera Selatan. Program-program ketenagakerjaan terus diarahkan dengan mendidik tenaga terampil dan menciptakan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada perluasan kesempatan kerja, sehingga pengurangan pengangguran dari tahun ke tahun dapat direalisasikan.

Program-program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengurangan pengangguran antara lain sebagai berikut :

1. Pelatihan untuk pengembangan skill.
2. Pelatihan Wirausaha Baru, Peningkatan Produktivitas, dan Bimbingan Konsultasi kepada UMKM untuk mewujudkan UMKM yang berkembang sehingga dapat memperluas kesempatan kerja.

3. Pemagangan Dalam dan Luar Negeri yang bertujuan untuk menjadikan para peserta magang menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Tenaga kerja magang yang bekerja dengan sangat baik maka pihak perusahaan disarankan untuk merekrutnya sebagai karyawan tetap.
4. Penempatan Tenaga Kerja AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKAN (Antar Kerja Antar Negara).
5. Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal.
6. Pengelolaan informasi pasar kerja melalui kegiatan Job Fair dan aplikasi Cari Kerja.

3.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2024 Realisasi keuangan anggaran sebesar Rp. 28.200.719.508 dari pagu anggaran yang sebesar Rp. 30.075.086.486 atau 93,77 persen dan realisasi fisik 100 persen.

Adapun efisiensi penyesuaian anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 595.209.514, semula pada APBD Induk 2024 anggaran Disnakertrans sebesar Rp. 30.670.296.000 menjadi Rp. 30.075.086.486 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Efisiensi ini berasal dari anggaran Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dan lain lain.

3.7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Capaian Pernyataan Kinerja

Tingkat Kesempatan Kerja terus ditingkatkan semaksimal mungkin, target peningkatan kesempatan kerja tentunya membawa konsekuensi terhadap program-program yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun depan. Program-program ketenagakerjaan terus diarahkan dengan mendidik tenaga terampil dan menciptakan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada perluasan kesempatan kerja, sehingga pengurangan pengangguran dari tahun ke tahun dapat direalisasikan.

Program-program yang terus akan dilaksanakan adalah program pelatihan yang mendukung peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja yaitu Program Penempatan Tenaga Kerja dan Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan beberapa kegiatan antara lain :

- 1 • Pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi
- 2 • Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
- 3 • Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi Kerja dalam satu Daerah Provinsi

Pada tahun yang akan datang, untuk mempercepat pertemuan antara pencari kerja dan pengguna tenaga kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Melaksanakan program peningkatan kesempatan kerja

- Pameran Bursa kerja (Job Fair)
- Pelatihan kewirausahaan

Selain Melaksanakan program-program tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan terus mendorong Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan pro rakyat yang berdampak pada penyerapan/penempatan tenaga kerja.

B

REALISASI ANGGARAN

Dalam menunjang kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 didukung Dana APBD, dengan uraian sebagai berikut :

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
1	2	3	4	5	
1	Terserapnya Tenaga kerja dipasar kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1 Pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi	Rp.100.000.000	
			- Pengadaaan Sarana Pelatihan Kerja	Rp.100.000.000	
2.		Program Penempatan tenaga Kerja	-	Rp.50.000.000	
			1 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Rp.245.00.000,-	Rp. 20.226.098
			- Pemeliharaan dan operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Rp. 185.000.000	
			- Job Fair/Bursa Kerja	Rp. 85.000.000	
			2 Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi Kerja dalam satu Daerah Provinsi	Rp. 100.000.000	
			- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yg tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA dan Lkasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp.60.000.000	Rp. 20.226.098
3.	Meningkatnya Kondisi Hubungan kerja yang harmonis	Program Hubungan Industrial	1 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan HI,	Rp.454.500.000,- Rp.179.500.000,-	Rp. 63.068.625

			Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi		
			- Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	Rp.179.500.000,-	
		2	Penetapan Upah Minimu (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Rp. 275.000.000	
			- Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Rp. 275.000.000	
4	Program Pengawasan Ketenagakerjaan			Rp.325.000.000,-	
		1	Penyelenggaraan Pengawas Ketenagakerjaan	Rp.325.000.000,-	
			- Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di perusahaan	Rp. 125.000.000	
			- Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Rp. 200.000.000	
5	Program Perencanaan Tenaga Kerja			Rp.100.000.000,-	
		1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro (RTK)	Rp.100.000.000,-	
			- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Rp.100.000.000,-	

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) LKjiP merupakan laporan pertanggung jawaban Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang berisikan keberhasilan dan kegagalan dalam mewujudkan Visi, Misi dan Tujuannya. Pencapaian Kinerja Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan terdapat 15 kegiatan dengan 38 sub kegiatan, realisasi sebagian pencapaian target 100%, sedangkan untuk capaian yang belum 100% ada beberapa kegiatan dikarenakan terdapat permasalahan sebagaimana telah diuraikan didepan.
- 2) Agar Tingkat Pencapaian Sasaran sesuai dengan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, perlu ditingkatkan koordinasi penyelenggaraan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten dan lintas sektor serta sharing pembiayaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten.
- 3) LKjiP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan laporan pertanggung jawaban Dinas kepada rakyat melalui Gubernur Sumatera Selatan atas tugas yang diberikan pada Tahun 2024, kiranya dapat digunakan oleh aparat penyelenggara Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di Provinsi Sumatera Selatan sebagai masukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, kebijakan serta pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan datang.

KEADAAN KETENAGAKERJAAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

- Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2024 sebanyak 4,66 juta orang, naik 71,64 ribu orang dibanding Agustus 2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,10 persen poin dibanding Agustus 2023.
- Penduduk yang bekerja pada Agustus 2024 sebanyak 4,48 juta orang, naik sebanyak 80,44 ribu orang dari Agustus 2023. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 62,02 ribu orang.
- Pada Agustus 2024 sebanyak 1,69 juta orang (37,66 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik sebesar 0,63 persen poin dibanding Agustus 2023.
- Persentase setengah pengangguran pada Agustus 2024 naik sebesar 1,37 persen poin, demikian juga dengan pekerja paruh waktu naik sebesar 1,95 persen poin dibanding Agustus 2023.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2024 sebesar 3,86 persen, turun sebesar 0,25 persen poin dibanding Agustus 2023.

1. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja (PUK) merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja pada Agustus 2024 sebanyak 6,58 juta orang, naik sebanyak 92,00 ribu orang dibandingkan Agustus 2023. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu 4,66 juta orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 1,92 juta orang.

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 terdiri dari 4,48 juta orang penduduk bekerja dan 0,18 juta orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2023, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 71,64 ribu orang, penduduk bekerja bertambah sebanyak 80,44 ribu orang, sementara pengangguran berkurang sebanyak 8,80 ribu orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan sejak Agustus 2019 sampai dengan Agustus 2024. TPAK pada Agustus 2024 sebesar 70,82 persen, naik 0,10 persen poin dibanding Agustus 2023. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2024, TPAK laki-laki sebesar 85,79 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 55,35 persen. Dibandingkan Agustus 2023, TPAK laki-laki mengalami kenaikan sebesar 0,40 persen poin sedangkan TPAK perempuan mengalami penurunan sebesar 0,19 persen poin.

Tabel 1 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2019–Agustus 2024

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2019 ¹⁾	Agustus 2020 ¹⁾	Agustus 2021 ¹⁾	Agustus 2022 ¹⁾	Agustus 2023 ²⁾	Agustus 2024 ²⁾	Perubahan Ags 2023–Ags 2024	
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Angkatan Kerja	4.202,82	4.329,75	4.398,91	4.497,96	4.588,17	4.659,81	71,64	1,54
- Bekerja	4.012,61	4.091,38	4.179,71	4.289,70	4.399,66	4.480,10	80,44	1,80
- Pengangguran	190,20	238,36	219,20	208,26	188,51	179,71	-8,80	-4,90
Bukan Angkatan Kerja	2.008,20	1.977,27	1.997,70	1.991,91	1.899,59	1.919,92	20,33	1,06
	persen	persen	persen	persen	persen	persen	persen poin	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,67	68,65	68,77	69,31	70,72	70,82	0,10	
- Laki-Laki	83,25	82,71	82,66	84,95	85,39	85,79	0,40	
- Perempuan	51,68	54,25	54,54	53,32	55,54	55,35	-0,19	

Keterangan: 1) Penghitungan dengan menggunakan penimbang proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015

2) Penghitungan dengan menggunakan penimbang proyeksi penduduk hasil SP 2020

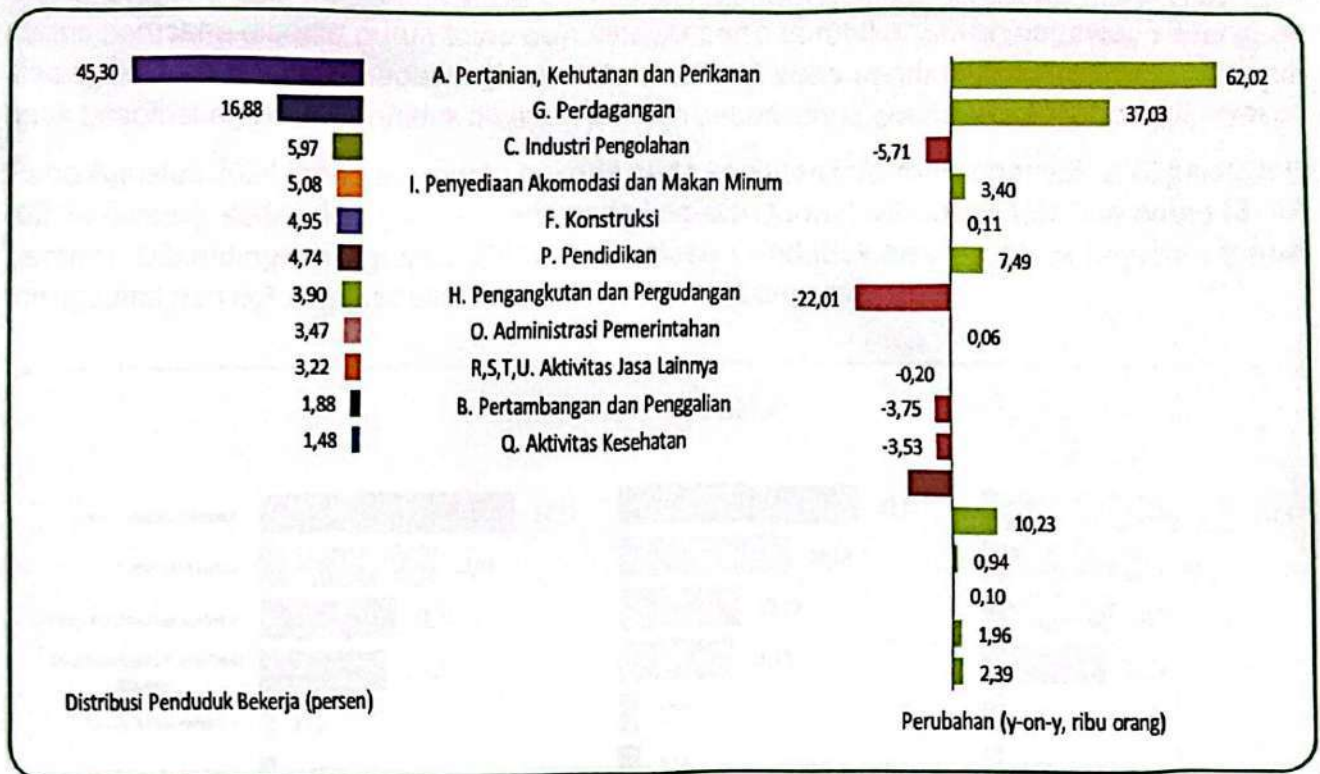
2. Karakteristik Penduduk Bekerja

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Untuk melihat struktur penduduk bekerja maka perlu diperhatikan karakteristiknya. Karakteristik penduduk bekerja akan disajikan berdasarkan lapangan usaha, status pekerjaan, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan jumlah jam kerja selama seminggu terakhir.

2.1. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan usaha dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024, tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 45,30 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,88 persen; serta Industri Pengolahan sebesar 5,97 persen.

Dibandingkan Agustus 2023, tiga kategori lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (62,02 ribu orang); Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (37,03 ribu orang); dan Informasi dan Komunikasi (10,23 ribu orang). Sementara tiga lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar adalah Pengangkutan dan Pergudangan (22,01 ribu orang), Aktivitas Profesional dan Perusahaan (10,10 ribu orang); dan Industri Pengolahan (5,71 ribu orang).



Keterangan: Penghitungan dengan menggunakan penimbang proyeksi penduduk hasil SP 2020

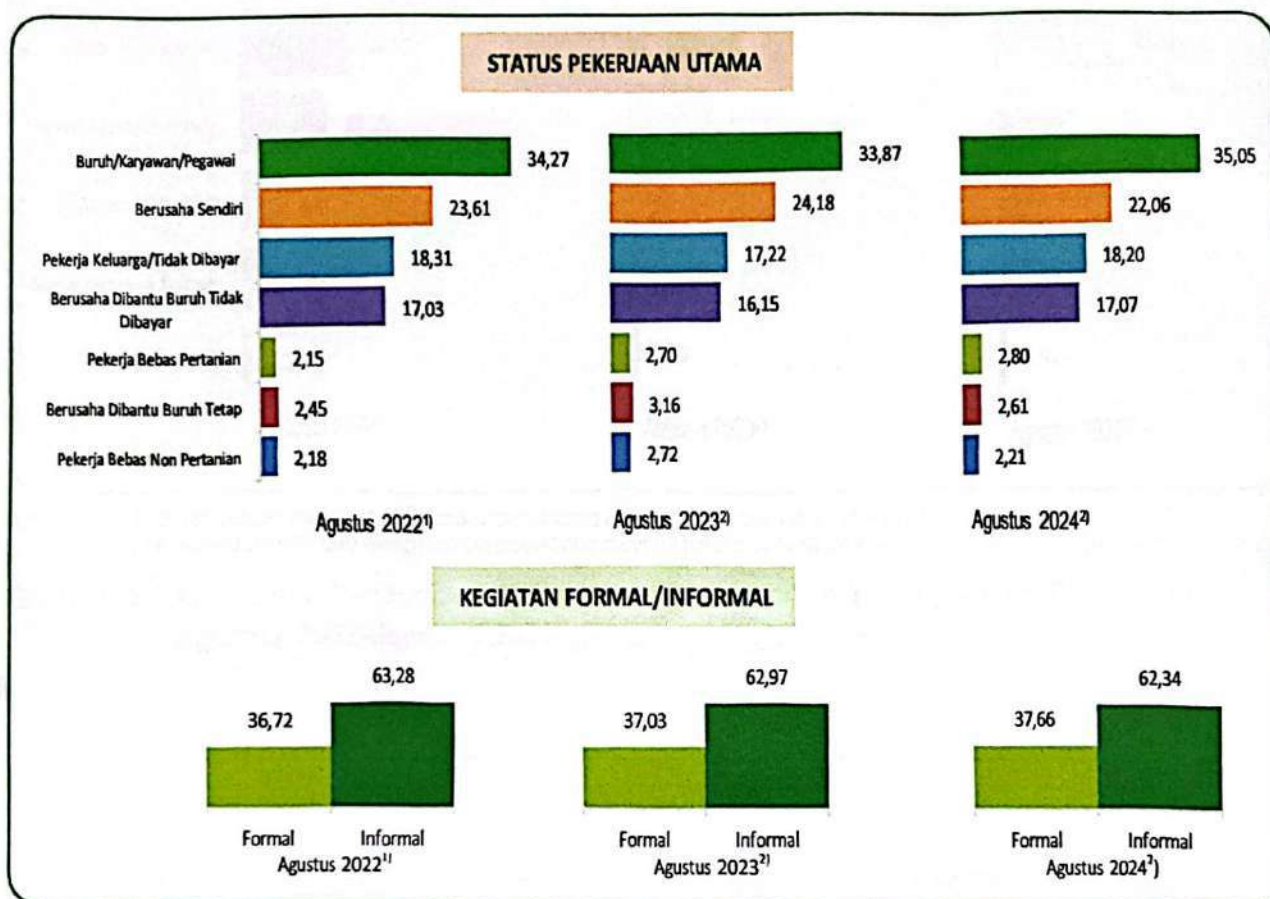
Gambar 1 Distribusi dan Perubahan Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Agustus 2024

2.2. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan

Pada Agustus 2024, penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebesar 35,05 persen, sementara yang paling sedikit berstatus pekerja bebas non pertanian yaitu sebesar 2,21 persen. Dibandingkan Agustus 2023, status pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah buruh/karyawan/pegawai sebesar 1,18 persen poin. Sementara itu, untuk status pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar terdapat pada status berusaha sendiri sebesar 2,12 persen poin

Berdasarkan status pekerjaan, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar serta buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar).

Pada Agustus 2024, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 2,79 juta orang (62,34 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 1,69 juta orang (37,66 persen). Dibandingkan Agustus 2023, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan sebesar 0,63 persen poin (Lampiran 1).



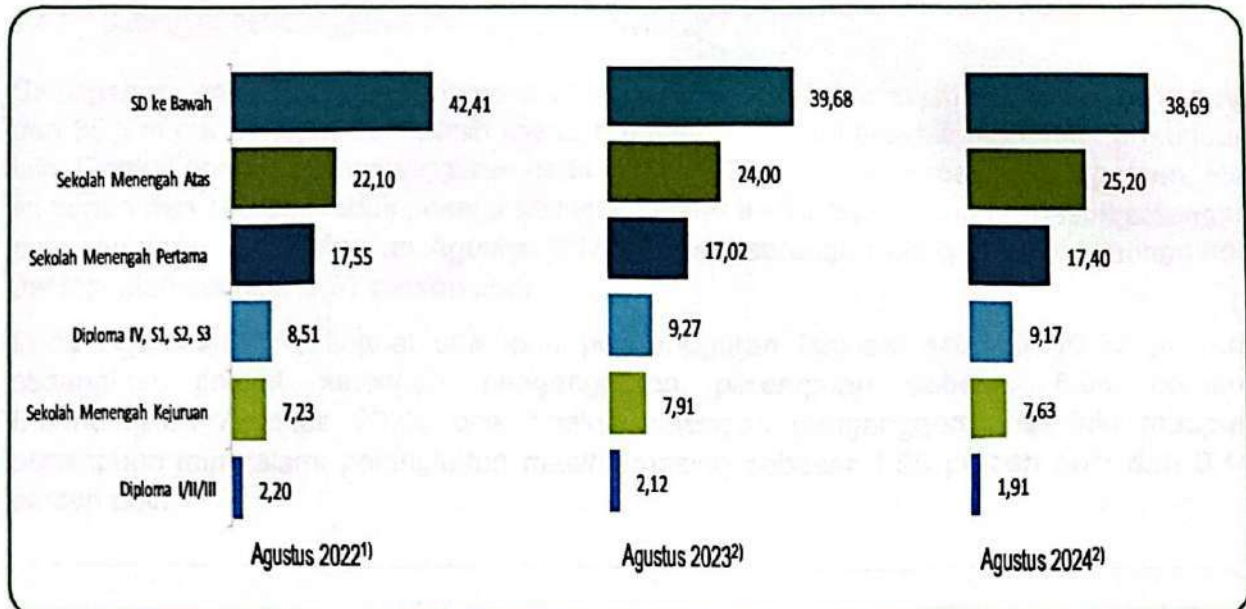
Keterangan: 1) Penghitungan dengan menggunakan penimbang proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015
2) Penghitungan dengan menggunakan penimbang proyeksi penduduk hasil SP 2020

Gambar 2 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Kegiatan Formal/Informal, Agustus 2022–Agustus 2024

2.3. Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2024, penduduk bekerja masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 38,69 persen. Sementara itu, penduduk bekerja tamatan Diploma I/II/III dan Diploma IV, S1, S2, S3 sebesar 11,08 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Agustus 2022 dan Agustus 2023.

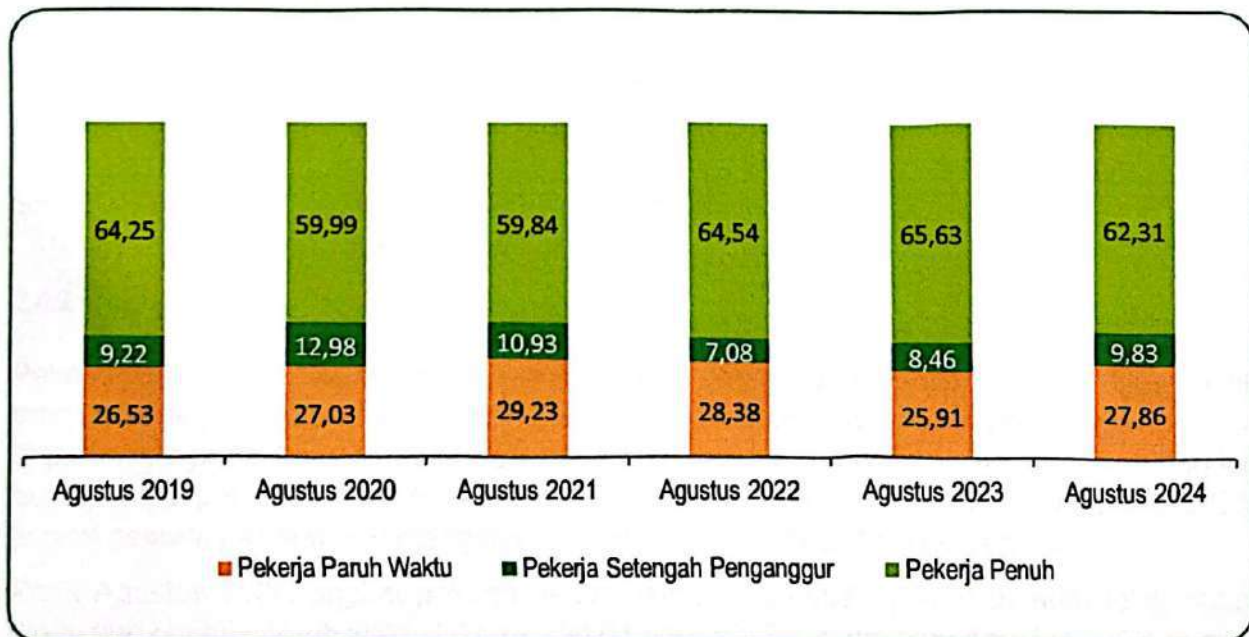
Dibandingkan dengan Agustus 2023, penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah, Sekolah Menengah Kejuruan, Diploma I/II/III, dan Diploma IV, S1, S2, S3 mengalami penurunan, masing-masing sebesar 0,99 persen poin, 0,28 persen poin, 0,21 dan 0,10 persen poin. Sementara itu, penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas mengalami peningkatan, dengan peningkatan terbesar pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (1,20 persen poin).



Keterangan: 1) Penghitungan dengan menggunakan penimbang proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015
2) Penghitungan dengan menggunakan penimbang proyeksi penduduk hasil SP 2020

Gambar 3 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2022–Agustus 2024

2.4. Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja



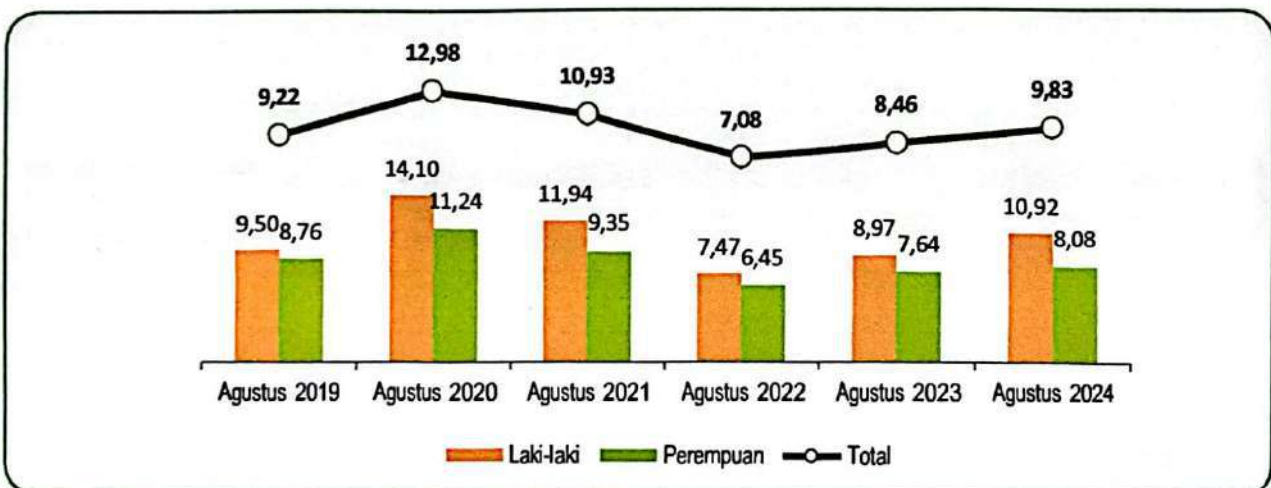
Gambar 4 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja, Agustus 2019–Agustus 2024

Sebagian besar penduduk bekerja sebagai pekerja penuh (jam kerja minimal 35 jam per minggu) dengan persentase sebesar 62,31 persen pada Agustus 2024. Sementara itu, 37,69 persen sisanya merupakan pekerja tidak penuh (jam kerja kurang dari 35 jam per minggu). Dibandingkan Agustus 2023, persentase pekerja tidak penuh mengalami peningkatan sebesar 3,32 persen poin. Pekerja tidak penuh dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu.

2.4.1. Setengah Pengangguran Menurut Jenis Kelamin

Setengah pengangguran adalah mereka yang jam kerjanya di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam per minggu) dan masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan lain. Tingkat setengah pengangguran pada Agustus 2024 adalah sebesar 9,83 persen. Hal ini berarti dari 100 penduduk bekerja terdapat sekitar 9 - 10 orang yang termasuk setengah pengangguran. Dibandingkan Agustus 2023, tingkat setengah pengangguran mengalami peningkatan sebesar 1,37 persen poin.

Pada Agustus 2024, tingkat setengah pengangguran laki-laki sebesar 10,92 persen, sedangkan tingkat setengah pengangguran perempuan sebesar 8,08 persen. Dibandingkan Agustus 2023, baik tingkat setengah pengangguran laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan masing-masing sebesar 1,95 persen poin dan 0,44 persen poin.

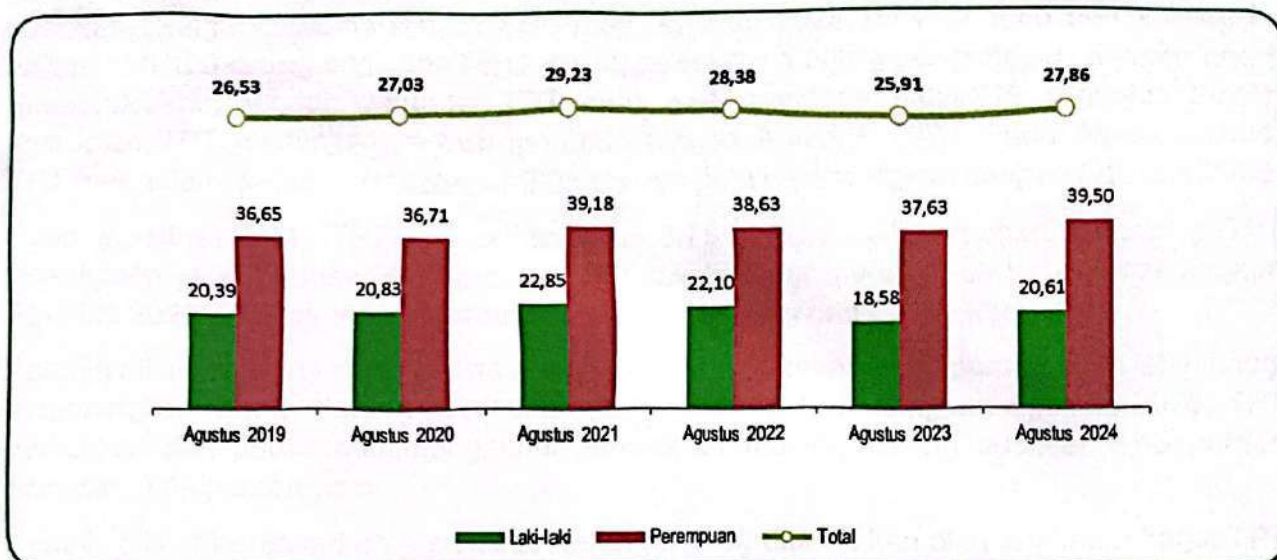


Gambar 5 Tren Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Jenis Kelamin (persen), Agustus 2019–Agustus 2024

2.4.2. Pekerja Paruh Waktu Menurut Jenis Kelamin

Pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Tingkat pekerja paruh waktu di Indonesia pada Agustus 2024 sebesar 27,86 persen, artinya dari 100 orang penduduk bekerja terdapat sekitar 27-28 orang pekerja paruh waktu. Dibandingkan Agustus 2023, tingkat pekerja paruh waktu mengalami peningkatan sebesar 1,95 persen poin.

Pada Agustus 2024, tingkat pekerja paruh waktu perempuan (39,50 persen) lebih tinggi dibanding pekerja paruh waktu laki-laki (20,61 persen). Dibandingkan Agustus 2023, tingkat pekerja paruh waktu laki-laki dan perempuan mengalami peningkatan, masing-masing sebesar 2,03 persen poin dan 1,87 persen poin.



Gambar 6 Tren Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Jenis Kelamin (persen), Agustus 2019–Agustus 2024

3. Karakteristik Pengangguran

Tabel 2 Karakteristik Pengangguran, Agustus 2019–Agustus 2024

Karakteristik Pengangguran	Agustus 2019 persen	Agustus 2020 persen	Agustus 2021 persen	Agustus 2022 persen	Agustus 2023 persen	Agustus 2024 persen	Perubahan Ags 2023–Ags 2024 persen poin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,53	5,51	4,98	4,63	4,11	3,86	-0,25
TPT Menurut Jenis Kelamin							
- Laki-Laki	4,61	5,48	4,84	4,53	3,96	3,75	-0,21
- Perempuan	4,39	5,54	5,20	4,80	4,34	4,02	-0,32
TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal							
- Perkotaan	6,88	8,57	8,46	7,36	6,18	5,70	-0,48
- Perdesaan	3,23	3,79	3,03	3,05	2,84	2,75	-0,09
TPT Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan							
SD ke Bawah	1,40	2,41	1,83	1,53	1,58	1,17	-0,41
Sekolah Menengah Pertama	3,73	4,08	3,46	3,43	1,67	2,13	0,46
Sekolah Menengah Atas	7,96	9,20	8,01	9,15	8,36	5,64	-2,72
Sekolah Menengah Kejuruan	11,82	13,52	12,30	7,81	7,98	10,53	2,55
Diploma I/II/III	8,88	5,49	7,36	8,41	3,92	10,22	6,30
Diploma IV, S1, S2, S3	4,91	6,19	6,54	5,87	4,08	5,68	1,60

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan; mempersiapkan usaha baru; sudah diterima bekerja/sudah siap berusaha tetapi belum mulai bekerja/berusaha; atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya

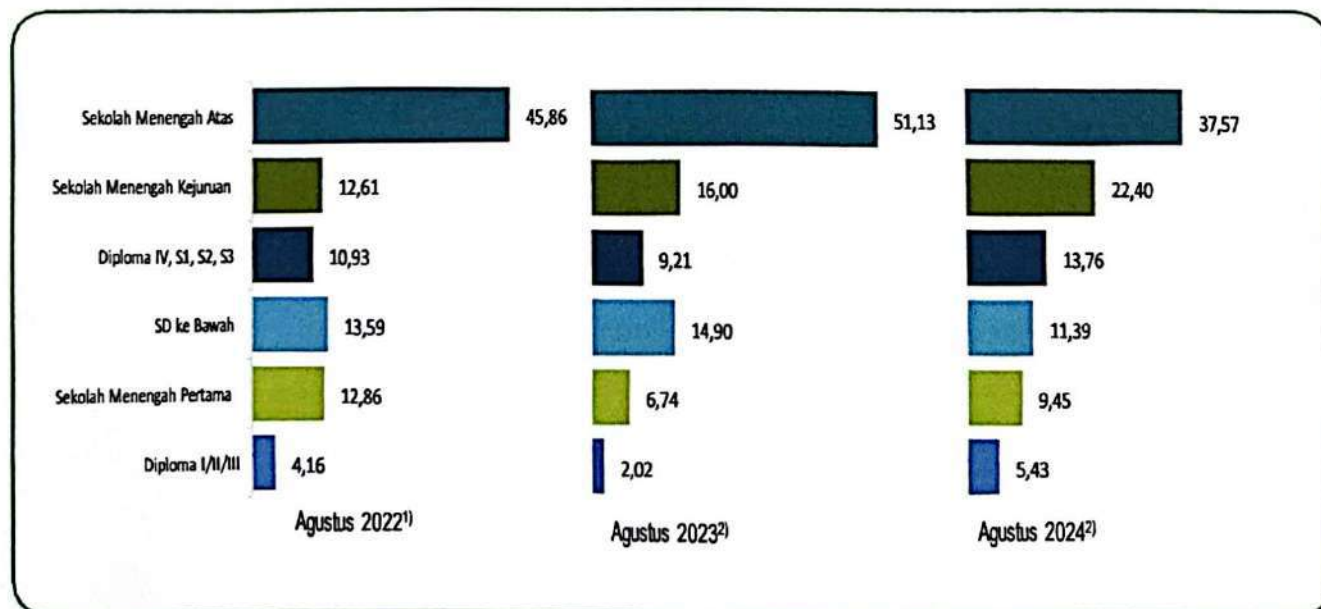
pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 3,86 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 4 orang penganggur. Selama enam tahun terakhir, terjadi kenaikan TPT saat awal pandemi Covid-19 (Agustus 2020), kemudian TPT menunjukkan tren menurun hingga Agustus 2024. Pada Agustus 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 0,25 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023.

Pada Agustus 2024, TPT laki-laki sebesar 3,75 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 4,02 persen. TPT laki-laki dan perempuan turun dibandingkan Agustus 2023, masing-masing sebesar 0,21 persen poin dan 0,32 persen poin.

Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (5,70 persen) jauh lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaan (2,75 persen). Dibandingkan Agustus 2023, TPT perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,48 persen poin dan 0,09 persen poin.

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan juga mempunyai pola yang hampir sama dari Agustus 2019 sampai dengan Agustus 2024. Pada Agustus 2024, TPT tamatan Sekolah Menengah Kejuruan masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, kecuali tahun 2022. TPT tamatan Sekolah Menengah Kejuruan pada Agustus 2024 yaitu sebesar 10,53 persen. Sementara itu, TPT yang paling rendah adalah pendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 1,17 persen.

Dibandingkan Agustus 2023, penurunan TPT terjadi hanya pada tingkat pendidikan SD ke bawah dan Sekolah Menengah Atas. Penurunan terbesar pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas yaitu sebesar 2,72 persen poin. Sementara itu, lulusan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Kejuruan, Diploma I/II/III dan Diploma IV, S1, S2, S3 mengalami kenaikan TPT. Kenaikan terbesar pada jenjang pendidikan Diploma I/II/III yaitu sebesar 6,30.



Gambar 7 Persentase Pengangguran Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2022–Agustus 2024

Selama tiga tahun terakhir, distribusi pengangguran menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan didominasi oleh tamatan Sekolah Menengah Atas. Pada Agustus 2024, persentase pengangguran tamatan Sekolah Menengah Atas sebesar 37,57 persen. Sementara itu, pengangguran tamatan Diploma I/II/III merupakan pengangguran dengan persentase terendah yaitu sebesar 5,43 persen.

Lampiran 1 Karakteristik Penduduk Bekerja, Agustus 2019–Agustus 2024

Karakteristik Penduduk Bekerja	Agustus 2019		Agustus 2020		Agustus 2021		Agustus 2022		Agustus 2023		Agustus 2024	
	ribu orang	persen (%)	ribu orang	persen (%)	ribu orang	persen (%)	ribu orang	persen (%)	ribu orang	persen (%)	ribu orang	persen (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Lapangan Usaha												
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1.842,08	45,91	1.881,70	45,99	1.879,52	44,97	1.992,26	46,44	1.967,14	44,71	2.029,17	45,30
B. Pertambangan dan Penggalian	65,17	1,62	62,75	1,53	61,29	1,47	75,04	1,75	88,05	2,00	84,30	1,88
C. Industri Pengolahan	249,70	6,22	241,92	5,91	264,71	6,33	267,85	6,24	273,15	6,21	267,44	5,97
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin	7,16	0,18	9,40	0,23	8,42	0,20	12,97	0,30	14,53	0,33	14,63	0,33
E. Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi	10,52	0,26	7,70	0,19	8,57	0,21	8,13	0,19	12,03	0,28	14,00	0,31
F. Konstruksi	211,82	5,28	202,81	4,96	222,61	5,33	201,84	4,71	221,87	5,04	221,98	4,95
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	661,72	16,49	663,24	16,21	722,72	17,29	694,99	16,20	718,90	16,34	755,94	16,88
H. Pengangkutan dan Pergudangan	173,33	4,32	178,96	4,37	159,28	3,81	133,53	3,11	196,81	4,47	174,79	3,90
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	188,00	4,69	185,74	4,54	197,46	4,72	193,23	4,51	224,07	5,09	227,47	5,08
J. Informasi dan Komunikasi	17,18	0,43	18,84	0,46	17,11	0,41	23,01	0,54	19,00	0,43	29,23	0,65
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	34,39	0,86	36,43	0,89	30,75	0,74	25,26	0,59	27,43	0,63	28,37	0,63
L. Real Estat	3,91	0,10	5,50	0,13	3,70	0,09	4,84	0,11	6,26	0,14	8,65	0,19
M, N. Aktivitas Profesional dan Perusahaan	35,74	0,89	43,84	1,07	41,77	1,00	57,56	1,34	55,82	1,27	45,72	1,02
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	132,53	3,30	141,11	3,45	145,17	3,47	194,65	4,54	155,35	3,53	155,41	3,47
P. Pendidikan	175,86	4,38	181,55	4,44	194,97	4,66	195,62	4,56	205,08	4,66	212,57	4,74
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	56,48	1,41	63,53	1,55	61,61	1,47	58,74	1,37	69,73	1,59	66,20	1,48
R,S,T,U. Aktivitas Jasa Lainnya	147,03	3,66	166,36	4,07	160,05	3,83	150,18	3,50	144,44	3,28	144,24	3,22
Jumlah	4.012,61	100,00	4.091,38	100,00	4.179,71	100,00	4.289,70	100,00	4.399,66	100,00	4.480,10	100,00
Status Pekerjaan												
Berusaha sendiri	894,66	22,30	900,42	22,01	903,58	21,62	1.012,64	23,61	1.063,72	24,18	988,20	22,06
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar	654,27	16,31	670,43	16,39	704,05	16,84	730,51	17,03	710,38	16,15	764,75	17,07
Berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar	115,29	2,87	91,47	2,24	99,38	2,38	105,22	2,45	138,92	3,16	116,93	2,61
Buruh/karyawan/pegawai	1.469,01	36,61	1.329,86	32,50	1.398,53	33,46	1.470,05	34,27	1.490,41	33,87	1.570,48	35,05
Pekerja bebas di pertanian	116,19	2,90	201,88	4,93	185,99	4,45	92,46	2,15	118,66	2,70	125,54	2,80
Pekerja bebas di nonpertanian	109,83	2,74	142,47	3,48	138,13	3,30	93,48	2,18	119,90	2,72	98,84	2,21
Pekerja keluarga/tidak dibayar	653,36	16,28	754,85	18,45	750,05	17,95	785,34	18,31	757,67	17,22	815,36	18,20
Jumlah	4.012,61	100,00	4.091,38	100,00	4.179,71	100,00	4.289,70	100,00	4.399,66	100,00	4.480,10	100,00
Kegiatan Formal/Informal												
Formal	1.584,30	39,48	1.421,33	34,74	1.497,90	35,84	1.575,27	36,72	1.629,33	37,03	1.687,41	37,66
Informal	2.428,31	60,52	2.670,05	65,26	2.681,81	64,16	2.714,43	63,28	2.770,33	62,97	2.792,69	62,34
Jumlah	4.012,61	100,00	4.091,38	100,00	4.179,71	100,00	4.289,70	100,00	4.399,66	100,00	4.480,10	100,00

Lanjutan Lampiran 1

Karakteristik Penduduk Bekerja	Agustus 2019		Agustus 2020		Agustus 2021		Agustus 2022		Agustus 2023		Agustus 2024	
	ribu orang	persen (%)	ribu orang	persen (%)	ribu orang	persen (%)	ribu orang	persen (%)	ribu orang	persen (%)	ribu orang	persen (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan												
SD ke Bawah	1.759,24	43,84	1.711,17	41,82	1.709,62	40,90	1.819,38	42,41	1.745,68	39,68	1.733,28	38,69
Sekolah Menengah Pertama	697,99	17,40	748,20	18,29	756,59	18,10	753,04	17,55	748,95	17,02	779,57	17,40
Sekolah Menengah Atas	844,38	21,04	923,46	22,57	931,35	22,28	948,07	22,10	1.056,04	24,00	1.128,82	25,20
Sekolah Menengah Kejuruan	285,30	7,11	275,78	6,74	333,45	7,98	310,11	7,23	347,97	7,91	341,79	7,63
Diploma I/II/III	108,40	2,70	107,38	2,63	100,16	2,40	94,26	2,20	93,34	2,12	85,72	1,91
Diploma IV, S1, S2, S3	317,30	7,91	325,39	7,95	348,54	8,34	364,84	8,51	407,68	9,27	410,92	9,17
Jumlah	4.012,61	100,00	4.091,38	100,00	4.179,71	100,00	4.289,70	100,00	4.399,66	100,00	4.480,10	100,00
Pekerja Penuh/Tidak Penuh												
Pekerja Penuh (≥ 35 jam ¹)	2.578,03	64,25	2.454,34	59,99	2.501,18	59,84	2.768,51	64,54	2.887,35	65,63	2.791,41	62,31
Pekerja Tidak Penuh (1–34 jam)	1.434,58	35,75	1.637,04	40,01	1.678,53	40,16	1.521,19	35,46	1.512,31	34,37	1.688,69	37,69
- Setengah Pengangguran	370,06	9,22	531,25	12,98	456,71	10,93	303,83	7,08	372,10	8,46	440,29	9,83
- Pekerja Paruh Waktu	1.105,79	26,53	1.105,79	27,03	1.221,82	29,23	1.217,36	28,38	1.140,21	25,91	1.248,40	27,86
Jumlah	4.012,61	100,00	4.091,38	100,00	4.179,71	100,00	4.289,70	100,00	4.399,66	100,00	4.480,10	100,00

Catatan: ¹ Pekerja penuh termasuk sementara tidak bekerja

Sumber: Diolah dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2019–Agustus 2024

Lampiran 2 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi, Agustus 2019–Agustus 2024

Provinsi	Agustus 2019	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023	Agustus 2024
	persen	persen	persen	persen	persen	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ogan Komering Ulu	4,58	6,01	4,57	4,39	4,13	4,05
Ogan Komering Ilir	2,98	3,29	3,01	3,75	3,23	3,38
Muara Enim	4,84	4,90	5,03	4,12	3,92	4,09
Lahat	3,68	4,18	3,60	4,02	3,41	3,11
Musi Rawas	2,93	3,29	2,78	1,92	1,95	1,94
Musi Banyuasin	4,15	4,79	3,99	4,40	2,58	2,13
Banyuasin	3,94	4,73	3,84	3,39	3,35	3,24
Ogan Komering Ulu Selatan	2,99	3,28	3,23	1,83	1,81	1,80
Ogan Komering Ulu Timur	3,46	3,81	3,18	4,79	3,96	3,45
Ogan Ilir	3,29	4,91	3,07	2,15	2,10	2,65
Empat Lawang	2,66	3,61	2,41	3,59	3,09	2,84
PALI	4,14	3,74	3,61	4,31	3,99	3,72
Musi Rawas Utara	3,81	6,88	6,72	5,29	5,11	4,91
Palembang	8,01	9,86	10,11	8,20	7,49	6,98
Prabumulih	6,12	6,64	5,86	5,25	5,05	4,94
Pagar Alam	2,48	2,50	1,64	3,62	2,71	2,34
Lubuk Linggau	4,71	7,41	6,27	5,94	5,64	5,29
Sumatera Selatan	4,53	5,51	4,98	4,63	4,11	3,86

Sumber: Diolah dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2019–Agustus 2024

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
LKjIP PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target Tahun 2024
1.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi	1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5.74
		1.2	Pendapatan per Kapita /PDRB ADHB	Juta Rp / Kapita	71.67
		1.3	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	6.00
		1.4	Indeks Entropi Theil	Indeks	2.097
2.	Meningkatnya Perekonomian Sektor Unggulan	2.1	Nilai Tukar Petani	%	109.11
3.	Meningkatnya Ekosistem Inovasi	3.1	Indeks Ekosistem Inovasi	Indeks	2.72
4.	Terkendali Laju Inflasi Daerah	4.1	Tingkat Inflasi Daerah	%	2,5±1
5.	Menjadikan Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan	5.1	Tingkat Kemiskinan	%	10.95
		5.2	Gini Ratio	Indeks	0.324
6.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	6.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.14
7.	Meningkatkan Perluasan Akses dan Kesempatan Terhadap Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	7.1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71.63
		7.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93.94
		7.3	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	70
		7.4	Prevalensi Stunting	%	14.3
8.	Meningkatnya Pelestarian Lingkungan dan Menurunkan Risiko Bencana	8.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71.93
		8.2	Persentase Penurunan Emisi GRK	%	8.04
		8.3	Indeks Risiko Bencana Sumsel	Indeks	136.53
9.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	9.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	67,5 (B)
10.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	10.1	Nilai SAKIP	Nilai	80.55
11.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	11.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	A

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
LKjIP PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024
PENGUKURAN KINERJA (PK)

Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	SKPD Penanggung Jawab	
1.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi	- Laju Pertumbuhan Ekonomi - Pendapatan per Kapita /PDRB - Indeks Pembangunan - Indeks Entropi Theil	1.1 Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi	1.1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5.74	5.07	87.41	BPS (BAPPEDA)		
				1.1.2	Pendapatan per Kapita /PDRB ADHB	Juta Rp / Kapita	71.67	75.13	104.83	BPS (BAPPEDA)		
				1.1.3	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	6.00	6.31	105.17	BPS (BAPPEDA)		
				1.1.4	Indeks Entropi Theil	Indeks	2.097	2.331	111.16	BPS (BAPPEDA)		
				RATA-RATA						102.14		
		1.2	Meningkatnya Perekonomian Sektor Unggulan	1.2.1	Nilai Tukar Petani	%	109.11	120.83	110.74	Dinas Pertanian dan TPH		
				RATA-RATA						110.74		
		1.3	Meningkatnya Ekosistem Inovasi	1.3.1	Indeks Ekosistem Inovasi	Indeks	2.72	3.25	119.49	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
				RATA-RATA						119.49		
		1.4	Terkendali Laju Inflasi Daerah	1.4.1	Tingkat Inflasi Daerah	%	2,5±1	1.20	100.00	BPS (BAPPEDA), Biro Perekonomian		
				RATA-RATA						100.00		
2.	Menjadikan Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan	- Tingkat Kemiskinan - Gini Ratio	2.1 Menjadikan Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan	2.1.1	Tingkat Kemiskinan	%	10.95	10.51	104.02	Dinas Sosial		
				2.1.2	Gini Ratio	Indeks	0.324	0.331	102.16	Dinas Sosial		
				RATA-RATA						103.09		
		2.2 Menurunnya Tingkat Pengangguran	2.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.14	3.86	106.76	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
					RATA-RATA						106.76	
					3.	Meningkatkan Perluasan Akses dan Kesempatan terhadap Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	- Indkes Pembangunan Manusia - Indeks Pembangunan Gender - Indeks Pembangunan Pemuda - Prevalensi Stunting	3.1 Meningkatkan Perluasan Akses dan Kesempatan Terhadap Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	3.1.1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71.63
3.1.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93.94	93.25					99.27	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
3.1.3	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	70	54					77.14	Dinas Pemuda dan Olahraga		
3.1.4	Prevalensi Stunting	%	14.3	1.20					191.61	Dinas Kesehatan		
RATA-RATA								117.78				
4.	Meningkatan Pelestarian Lingkungan dan Menurunkan Risiko Bencana	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup - Persentase Penurunan Emisi - Indeks Risiko Bencana Sumsel	4.1 Meningkatnya Pelestarian Lingkungan dan Menurunkan Risiko Bencana	4.1.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71.93	72.69	101.06	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan		
				4.1.2	Persentase Penurunan Emisi GRK	%	8.04	20.20	251.24	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan		
				4.1.3	Indeks Risiko Bencana Sumsel	Indeks	136.53	131.24	103.87	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
		RATA-RATA						152.06				
5.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	- Indeks Reformasi Birokrasi	5.1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	5.1.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	67,5 (B)	74.58	110.49	Biro Organisasi		
			RATA-RATA						110.49			
			5.2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	5.2.1	Nilai SAKIP	Nilai	80.55	77.53	96.25	BAPPEDA, Biro Organisasi dan Inspektorat		
				RATA-RATA						103.87		
			5.3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	5.3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	A (88,31)	A(89,99)	101.90	Biro Organisasi		
				RATA-RATA						101.90		